

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan kegiatan politik yang terdapat keterkaitan dengan terbentuknya kekuasaan. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jepara juga erat kaitannya dengan pola politik dari masing-masing calon dalam membentuk pola komunikasi dan simpati dari masyarakat Kabupaten Jepara. Organisasi keagamaan menjadi salah satu basis kekuatan politik dari masing-masing calon. Nahdlatul Ulama (NU) digadang-gadang menjadi sumber suara terkuat dikarenakan masyarakat Kabupaten Jepara yang bermayoritaskan umat Islam dan berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU).²

Sebagai organisasi massa keagamaan Islam, NU tidak berafiliasi dalam kancah politik praktis atas dasar organisasi pada pemilu. NU dalam internal peraturan organisasi sudah bukan lagi menjadi partai politik dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan seperti yang tertuang dalam peraturan untuk kembali pada khittah 1926. Netralitas NU diwujudkan dengan hasil fatwa pada muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-27 di Situbondo, Jawa Timur yang secara tegas menyatakan bahwa NU telah kembali pada khittah 1926. Makna khittah Nahdlatul Ulama (NU) ialah mengembalikan sepenuhnya NU pada cita-cita awal para pendiri saat didirikannya NU yaitu sebagai organisasi sosial berbasis keagamaan.

Hasil muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur menghasilkan keputusan Nomor 02/MNU-27/1984 yakni mengembalikan NU pada khittah 1926 yang berdasarkan tiga esensi pokok. *Pertama*, bahwa *jam'iyah* NU harus kembali pada struktur awal, yakni peranan ulama *Syuriah* lebih dominan pada *Tanfidziyah*; *Kedua*, NU secara *jam'iyah* tidak lagi memiliki ikatan organisatoris dalam bentuk apapun dengan organisasi kekuatan sosial politik; *Ketiga*, NU *jam'iyah* menitikberatkan program dan kegiatannya dalam pendidikan, dakwah, keagamaan dan kesejahteraan sosial.³

Indikasi bahwa NU yang merupakan organisasi keagamaan tidak boleh berpolitik telah tertuang dalam khittah 1926. Akan tetapi NU memberi kebebasan kepada para *nahdliyin* (warga Nahdlatul Ulama) yang dalam hal ini pilkada Kabupaten Jepara untuk berpolitik praktis

² H.A. Nasir YUSUF, *Menggugat Khittah NU*, Cet. 1 (Bandung: Bandung : Humaniora Utama Press (HUP), 1994).

³ Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara* (Yogyakarta: Yogyakarta :: LKis., 1999, 1999).

sesuai dengan hak politik yang dimiliki oleh tiap individu. NU sebagai organisasi membuat fatwa bahwa para *nahdliyin* tidak boleh mengatasnamakan organisasi dalam bentuk dukung-mendukung di ranah politik praktis.

Kabupaten Jepara pada pilkada 2017 dihadapkan dengan dinamika dan situasi politik yang dinamis yang secara tidak langsung berhubungan dengan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Kabupaten Jepara. Dari sudut pandang demokrasi pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung merupakan sarana penyaluran aspirasi demokrasi serta pelaksanaan kedaulatan di ruang lingkup wilayah kabupaten atau kota dan provinsi. Rakyat mempunyai hak individu untuk terlibat secara langsung dalam proses penentuan kepala dan wakil kepala daerahnya masing-masing, yaitu pada wilayah provinsi rakyat memilih calon gubernur dan wakil gubernur, dan di wilayah kabupaten atau kota rakyat memilih calon bupati atau walikota dan wakil bupati atau wakil walikota.

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Jepara khususnya masyarakat Desa Panggung yang juga memperlihatkan eksistensi dirinya dengan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik untuk memilih bupati dan wakil bupati Jepara pada pilkada secara langsung. Pemilihan secara langsung tersebut tentunya tidak dapat terlepas dari keterlibatan perilaku politik warga di pilkada tersebut.⁴

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah telah tegas mengamanatkan bahwa proses pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud pembaruan dan kemajuan di dalam negara demokrasi Indonesia. Rakyat dapat berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerahnya masing-masing. Dan hal tersebut merupakan momentum kebangkitan demokrasi di Indonesia.

Keputusan politik terkait penyelenggaraan pilkada secara langsung ialah pengambilan keputusan politik yang layak dicatat sebagai suatu peristiwa politik bersejarah. Sebelum pengadaan pilkada secara langsung, masyarakat Indonesia dalam sejarah perpolitikannya belum pernah menggunakan sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi indikasi terjadinya perubahan nilai-nilai dan bahkan pilihan ideologis yang telah ada sejak lama bahkan berabad-abad lamanya.⁵

⁴ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

⁵ J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*.

Secara *esensial* pilkada merupakan bentuk proses tentang bagaimana rakyat berpartisipasi langsung dalam proses memunculkan pemimpin lokal dan memilih pemimpin di wilayah masing-masing. Melalui partisipasi politik, masyarakat menciptakan satu bentuk pemberdayaan demokrasi dan proses pemilihan pemimpin secara langsung yang dimana masyarakat dalam dukungannya menjadi faktor krusial dalam proses kemenangan pemimpin di wilayah tersebut. Dukungan masyarakat tersebut tidak terlepas dari pola perilaku dan budaya politik yang ada di daerah tersebut. Kemampuan calon pemimpin dalam mengkomunikasikan dan mengartikulasikan program yang ditawarkan menjadi salah satu indikator proses penyerapan pola perilaku politik masyarakat. Proses tersebut diharapkan juga akan menjadi pintu aspirasi dan harapan masyarakat pada pemimpinnya.⁶

Terkait keterseleenggaraan pilkada, masyarakat di negara demokrasi melakukan aktivitas politik secara langsung. Masyarakat terlibat mulai dari proses awal pilkada, bahkan sebelum pilkada seperti pembentukan partai politik hingga mobilisasi massa. Dan terlibat dalam pemilu atau pilkada merupakan proses aktivitas politik yang tidak dapat terhindarkan.

Menurut Max Weber sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa masyarakat melakukan aktivitas politik karena: *Pertama*, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial; *Kedua*, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu; *Ketiga*, alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok; *Keempat*, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.⁷

Aktivitas politik inilah yang merupakan dasar dari terbentuknya perilaku politik suatu masyarakat dalam penentuan dan pemilihan kepala daerah. Peneliti akan membahas mengenai perilaku politik individu yang berlatar belakang terhadap pengaruh organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan dalam suatu masyarakat telah lama ada dan hal tersebut mengikat berdasarkan peraturan formal maupun informalnya. Perilaku politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh organisasi yang dinaunginya.

⁶ J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*.

⁷ Budiardjo Miriam, *Partisipasi Dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).

Perilaku politik masyarakat dapat dilihat dalam partisipasi masyarakat, contohnya melalui pemilu. Masyarakat membuat kontrak sosial dalam sebuah negara demokrasi dengan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan pilkada. Pada saat proses penyelenggaraan pilkada rakyat memilih pemimpin untuk duduk dalam jabatan politis pemerintahan, yaitu jabatan eksekutif. Di dalam pilkada, rakyat yang memenuhi syarat dalam memilih, secara hak dan kewajiban berhak memilih figur pemimpin yang dinilai sesuai dengan kriteria dan aspirasi politiknya.⁸

Proses perilaku politik masyarakat khususnya dalam lingkup kawasan pedesaan baru dapat berjalan apabila perilaku politik berupa partisipasi masyarakatnya sesuai dengan budaya dan kondisi psikologis masyarakatnya. Bentuk sosialisasi dan komunikasi dari para calon kandidat serta program kerja yang akan dikampanyekan harus sesuai dengan kondisi budaya politiknya, dimana proses pelaksanaan kampanye serta sosialisasi tersebut biasanya akan dilaksanakan dari jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pilkada berlangsung agar para calon dapat membuat strategi khusus bagi pemilihnya. Proses kampanye tersebut kerap dilakukan dengan berbagai cara bahkan banyak data ditemukan dilapangan, bahwa kebanyakan calon pemimpin kepala daerah seringkali menggunakan identitas organisasi keagamaan serta mengabaikan etika politik seperti adanya politik uang dan politik identitas.

Proses demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Jepara yang telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jepara pada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu, terdapat dua calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar diri pada Pemilihan Bupati Serentak 2017 ini. Calon Bupati petahana, yakni Ahmad Marzuqi, SE yang mencalonkan diri menjadi Bupati didampingi oleh Dian Kristiandi, S.Sos yang diusung oleh PDIP. Selain itu, ada pula wakil Bupati petahana Dr. H. Subroto, SE, MM yang serta mencalonkan diri bersama H. Nur Yahman, SH dengan didukung oleh partai Hanura, PAN, Demokrat, Golkar, PKB, PPP, PKS, Nasdem, serta Gerindra. Pasangan nomor urut 1 yaitu Dr. H. Subroto dan pasangannya memperoleh suara sebesar 304.259 suara atau setara dengan 48,75%, sedangkan pasangan nomor urut 2 Ahmad Marzuqi, SE memperoleh suara sebesar sebesar 319.837 suara atau setara dengan 51,25%. Pemilihan Kepala Daerah Bupati Jepara tahun

⁸ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang Press, 1995).

2017 pun dimenangkan oleh calon kedua yakni Ahmad Marzuqi, SE dan Dian Kristiandi, S. Sos.⁹

Hal tersebut dapat diketahui bahwa pasangan Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi memperoleh jumlah suara lebih banyak dari pesaingnya dan ditetapkan menjadi bupati dan wakil bupati di Jepara untuk periode 2017 - 2022 dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Jepara. Ahmad Marzuqi disini juga merupakan Bupati Jepara pada periode sebelumnya yaitu 2013-2017.

Ketertarikan peneliti dalam melihat bagaimana pasangan Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi dan timnya dapat memperoleh kemenangan untuk kedua kalinya. Dan tim sukses Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi bisa memanfaatkan semua sumber daya politik dalam mempertaruhkan kembali kursi “Jepara 1” setelah periode kepemimpinannya terdahulu. Hal tersebutlah yang menjadi alasan menarik peneliti dalam melihat lebih dalam pilkada tersebut terutama dari segi perilaku politik masyarakat pedesaan.

Pada pemilihan secara langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut mengharuskan para calon atau kandidat pemimpin daerah mengatur siasat dengan strategi-strategi yang matang dan tepat supaya dapat menentukan pola yang tepat. Terutama dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat khususnya warga Nahdlatul Ulama di lingkup pedesaan sehingga mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat. Pola penentuan perilaku politik akan menjadi strategi kemenangan dalam pemilihan tersebut.

Perilaku politik warga Nahdlatul ulama dalam menentukan kepala daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 cenderung berbeda-beda. Perilaku politik warga Nahdlatul Ulama dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan strategi masing-masing calon dan pengaruh ketokohan dari calon terhadap suatu organisasi keagamaan. Pendekatan terhadap latar belakang organisasi keagamaan di masyarakat terutama Nahdlatul Ulama dalam mendapatkan suara dari organisasi keagamaan yang ada di Desa Panggung menjadi alasan terciptanya perilaku dan budaya politik.¹⁰

Keterlibatan warga Nahdlatul Ulama (NU) dalam proses pilkada merupakan bentuk partisipasi politik. Perilaku politik masyarakat pada pilkada bupati dan wakil bupati periode 2017-2022 menarik untuk diamati lebih lanjut mengingat keberhasilan Ahmad Marzuqi dalam

⁹ ‘Pemilihan Umum Bupati Jepara 2017’, 2017 <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Jepara_2017> [accessed 11 April 2021].

¹⁰ Muhammad Asfar, *Pemilu Dan Perilaku Memilih, 1955-2004* (Eureka, 2006).

memobilisasi warga Nahdlatul Ulama di periode sebelumnya dan juga kemenangan saat pilkada tahun 2017. Kemenangan tersebut juga mengindikasikan adanya kontrak sosial berupa perilaku politik masyarakat di lingkup pemilihan kepala daerah. Konteks tersebut menggambarkan proses pilkada terkait perilaku politik, antara lain adalah pada pelaksanaan kampanye, keterlibatannya terhadap partai-partai politik, pelaksanaan pemberian suara, dan juga dalam pengamanan hasil pilkada tersebut.

Fenomena perilaku politik dalam proses pemilihan tampaknya akan menjadi persoalan penting di kalangan masyarakat, sebab kecenderungan dalam memberikan suara akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Proses pemilihan inilah yang akan menentukan kualitas pemimpin. Misalnya, pemilih yang hanya melihat dari penampilan fisik dari seorang calon, pemilih yang dalam menentukan pilihannya atas emosi mereka, sehingga konsekuensi yang didapat ialah seorang pemimpin yang kurang diharapkan untuk menumbuhkan tingkat ekonomi, sosial, dan pendidikan kehidupan rakyatnya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan masing-masing individu yang hanya berdasar atas suka dan tidak suka bukan berdasar atas integritas dan kapabilitas seseorang dalam menjatuhkan pilihannya, lalu terkait pilihan masyarakat Nahdlatul Ulama sendiri dalam menentukan pilihannya, apakah mereka termasuk dari pemilih skeptis, tradisional, rasional, dan kritis.¹¹

Fenomena perilaku politik dalam pilkada yang terjadi di Kabupaten Jepara dapat dianalisis dengan pendekatan perilaku politik pemilih. Perilaku politik masyarakat merupakan suatu yang selalu berubah-ubah dan bersifat kompleks. Secara umum menurut para pakar politik terkait perilaku pemilih dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor pilihan rasional.¹²

Ketika berbicara tentang perilaku politik pemilih, maka peneliti melakukan penelitian di Desa Panggung, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara karena disana terdapat fenomena politik yang sangat menarik. Desa Panggung merupakan wilayah pedesaan dengan sebagian besar masyarakatnya berafiliasi pada Nahdlatul Ulama dan dalam setiap acara keagamaan ataupun politik Nahdlatul Ulama selalu menjadi penyokong utama kegiatan-kegiatan tersebut. Hal tersebut dibuktikan ketika salah satu pasangan calon bupati berkampanye dalam acara keagamaan desa yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama,

¹¹ Asfar, *Pemilu Dan Perilaku Memilih*.

¹² Asfar, *Pemilu Dan Perilaku Memilih*.

masyarakat Desa Panggung mendukung bahkan turut aktif dalam proses politik sekaligus acara keagamaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara, hal tersebut dikarenakan kecenderungan perilaku pemilih yang berubah-ubah. Terkait penelitian ini peneliti akan mencoba melihat bagaimana pasangan calon yang menang yakni pasangan Ahmad Marzuqi–Dian Kristiandi menciptakan dan memanfaatkan strategi kemenangan agar dapat mempengaruhi perilaku politik warga Nahdlatul ulama Desa Panggung untuk mencapai kemenangannya melalui sebuah penelitian yang berjudul: “Perilaku Politik Warga Nahdlatul Ulama Desa Panggung dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jepara 2017”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif melibatkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Berangkat dari argumen tersebut maka fokus penelitian yang dilakukan peneliti menetapkan argumennya dengan melakukan pembatasan. Untuk lebih terarahnya penelitian ini peneliti merasa perlu melakukan pembatasan masalah yang bertempat di Desa Panggung, Kedung, Jepara, dengan pelaku penelitian yaitu warga Nahdlatul Ulama di Desa Panggung yang dalam hal ini berfokus pada pemilih dalam Pilkada Kabupaten Jepara 2017 dan juga berkaitan dengan aktivitas perilaku politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jepara tahun 2017 serta apa saja faktor dalam penentuan perilaku politik tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diperoleh di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana perilaku politik warga Nahdlatul Ulama Desa Panggung pada Pilkada Kabupaten Jepara tahun 2017?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan politik warga Nahdlatul Ulama Desa Panggung pada Pilkada Kabupaten Jepara tahun 2017?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku politik warga Nahdlatul Ulama Desa Panggung pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jepara 2017.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik warga Nahdlatul Ulama Desa Panggung pada Pilkada Kabupaten Jepara tahun 2017.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait maupun berminat dari penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini berfungsi untuk memberikan informasi dan referensi mengenai perilaku politik warga Nahdlatul Ulama Desa Panggung, Kedung, Jepara pada pilkada Kabupaten Jepara tahun 2017. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah pustaka dan dapat menjadi literatur Program Studi Ilmu Pemikiran Politik Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Kudus.

2. Dari Segi Praktis

Kegunaan praktis dari sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi pihak terkait untuk terutama dalam pemilihan kepala daerah dan pola perilaku politik masyarakat di dalamnya.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan informasi bagi masyarakat tentang dinamika yang muncul dalam sistem percaturan politik terutama dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.
- c. Memberikan inspirasi dan bisa menjadi acuan untuk yang sedang melakukan penelitian terkait perilaku politik warga Nahdlatul Ulama dalam pilkada termasuk mengakumulasi sumber daya politik.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penelitian skripsi yang akan peneliti susun:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II: Kerangka Teori

Pada bab ini berisi uraian konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi pengertian tentang teori Pemilihan

Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Teori Perilaku Politik, dan Teori Budaya Politik.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: Hasil dan Analisis Penelitian

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, serta pembahasan antara teori dan implementasi.

BAB V: Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan, saran dan penutup.

